KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244

Laman : ntb.kemenkumham.go.id , Surel : [kanwilntb@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id)

**LAPORAN**

**TINDAK LANJUT HASIL REVIU/EVALUASI TERHADAP PERHITUNGAN ABK**

**DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB**

**6 SEPTEMBER 2023**

1. **PENDAHULUAN**
   1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang berbasis teknologi informasi sehingga tercapai tujuan organisasi dengan baik dan lancar maka Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat penting untuk dilaksanakan.

* 1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan tindak lanjut hasil reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI ini adalah:

* + 1. Untuk memproses lebih lanjut atas kendala-kendala yang dihadapi pada saat perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI sehingga didapatkan aksi yang harus dilaksanakan
    2. Untuk dilaksanakan penambahan atau pendistribusian JF/Pelaksana TI atas kendala-kendala yang dihadapi pada saat perhitungan analisis beban kerja sehingga kebutuhan pegawai dapat diketahui secara efektif dan efisien.
    3. Untuk dasar perencanaan giat pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi JF/Pelaksana TI.
  1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada laporan ini meliputi tindak lanjut hasil reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan Satuan Kerja

* 1. Dasar Hukum
     + - Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
       - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
       - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
       - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: SEK-13.TI.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 31 Agustus 2023, Tentang Peningkatan Kematangan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
       - Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SEK.1-OT.01.04-165 Tanggal 10 Maret 2023 Hal Penyesuaian Analisis Jabatan dan Pengisian Analisis Beban Kerja Tahun 2023.

1. **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Dalam kegiatan ini dilaksanakan reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkompilasi dokumen kebutuhan pegawai khususnya untuk JF/Pelaksana TI;
2. Mengamati kembali dokumen kebutuhan pegawai khususnya untuk JF/Pelaksana TI;
3. Menandai beban kerja dari jabatan JF/Pelaksana TI apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan tugas secara real di lapangan;
4. Menelaah laporan reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI;
5. Mengamati beban kerja JF/Pengelola TI di lapangan.
6. Merencanakan giat pelatihan bagi JF/ Pelaksana TI.
7. Pendistribusian tugas dan fungsi secara proporsional dan tepat sesuai bidang jabatan JF/Pelaksana TI
8. **HASIL YANG DICAPAI**

Setelah dilaksanakan tindak lanjut hasil reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI, maka didapatkan hasil bahwa unit kerja Kantor Wilayah tetap membutuhkan JF/Pengelola TI sebanyak 7 (Tujuh) orang sesuai dengan laporan reviu/evaluasinya.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
2. Simpulan

Dari uraian laporan tindak lanjut reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan JF/Pelaksana TI telah sesuai dengan beban kerja unit kerja.

1. Saran

Berdasarkan reviu/evaluasi terhadap perhitungan analisis beban kerja JF/Pelaksana TI, maka saran yang dapat disampaikan adalah memonitoring beban kerja JF/Pelaksana TI secara berkala sehingga jikalau terjadi perubahan dapat disesuaikan dengan cepat.

1. **PENUTUP**

Demikian Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu/Evaluasi Terhadap Perhitungan ABK Jabatan Fungsional dan Pelaksana Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat kami buat agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 6 September 2023

Kepala Divisi Administrasi

Anton Edward Wardhana

NIP 197407041999031001

C:\Users\USER\Desktop\bsre (2).png